

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi yaitu melimpahkan seluruh urusan pendidikan kepada pemerintah pusat. Dalam sistem tersebut madrasah tidak diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Dengan menganut sistem sentralisasi tersebut pendidikan di Indonesia dinilai sangat kaku dan sentralistik. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Sri Minarti bahwa: “Faktor-faktor penyebab kurangnya keberhasilan upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *inputoriented* dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.”

Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang pendidikan. Secara umum desentralisasi dapat dipahami sebagai pendelegasian sejumlah wewenang kepada otoritas yang lebih rendah. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat daerah, khususnya dalam arti terciptanya kesejahteraan yang merata di daerah (Ahmad, 2015, p.72). Sistem desentralisasi di bidang pendidikan telah memberikan peluang kepada madrasah untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan begitu, Madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan sesuai dengan potensi peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan jika sekolah diberikan kepercayaan untuk

mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya (Juanda, 2019, hlm : 3).

Kelahiran UU. No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakhiri era sentralisasi, dan kini telah lahir era desentralisasi dan otonomi daerah. Satuan pendidikan madrasah yang dalam era sentralisasi sering disebut sebagai sebuah institusi yang berada pada level paling bawah yang mengurus dunia pendidikan untuk anak-anak bangsa. Kini satuan pendidikan madrasah harus dapat bertanggung jawab untuk dapat mengurus dirinya sendiri, melalui mekanisme yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah (MBM).

Sebelum diterapkannya MBM, Madrasah Aliyah di Garut mengalami kesulitan untuk menjadi madrasah yang unggul di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen madrasah. Maka dari itu, untuk memperbaiki sistem manajemen madrasah, Madrasah Aliyah di Garut mulai menerapkan MBM. Madrasah Aliyah di Garut menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada tahun 2006.

Tujuan Madrasah Aliyah di Garut menggunakan MBM bertujuan untuk mengembangkan madrasah atau meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kondisi madrasah dengan mengoptimalkannya melalui kekuatan atau kelebihan madrasah.

Sebuah penelitian pada skripsi salah satu mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2019. Dalam penelitiannya setelah diterapkannya MBS Sekolah memiliki akuntabilitas dalam meningkatkan lulusan yang terserap di PTN dan PTS. Implementasi MBS memiliki dampak pada akuntabilitas sekolah dalam meningkatkan mutu outputnya. Mutu lulusan dapat dilihat dari besar jumlahnya lulusan yang terserap di PTN maupun PTS unggulan. SMA di Garut selama 2 tahun terakhir sudah mengalami peningkatan dalam menyalurkan lulusannya ke beberapa perguruan tinggi.

Dengan adanya MBM, Madrasah Aliyah di Garut ingin menciptakan suasana dan kondisi madrasah yang mandiri, transparan, akuntabel, dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat baik secara internal dan eksternal. Dalam hal ini, madrasah memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan manajemen berbasis madrasah.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara professional (Usman, 2014, hlm:15). Tujuan pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah di bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan madrasah di seluruh jenjang pendidikan.

Maka dari itu, semua urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, bahkan dapat diserahkan langsung kepada madrasah itu sendiri. Dalam hal ini, madrasah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen madrasah yang efektif dan efisien.

Salah satu permasalahan utama rendahnya mutu pendidikan disebabkan kurang terampilnya madrasah dalam mengelola manajemen madrasah, baik itu mengelola tenaga SDM nya, kurikulum, sarana dan prasarana maupun mengelola pembiayaan pendidikan. Peran pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan (Sudrajat, 2005, hlm:97). tanggung jawab madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari memperbaiki sistem manajemen madrasah. Salah satu cara untuk memperbaiki buruknya sistem manajemen madrasah yaitu dengan mengimplementasikan MBM (Manajemen Berbasis Madrasah).

MBM merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah *Diundangkan* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “*Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah.*”

Pergeseran dari manajemen berbasis pusat (sentralistik) menuju manajemen berbasis madrasah memerlukan peninjauan kembali terhadap aturan madrasah, peran unsur-unsur madrasah, kebiasaan bertindak, dan hubungan antar unsur-unsur madrasah. Aturan madrasah perlu dirumuskan kembali agar sesuai dengan tuntutan manajemen berbasis madrasah yaitu otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi.

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Pengaruh MBM diharapkan mampu menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Warga madrasah yang meliputi kepala madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan harus bergerak aktif untuk mengatasi masalah yang ada di madrasah. Selain itu, partisipasi orangtua maupun masyarakat sekitar juga harus terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan manajemen madrasah. Jika kegiatan manajemen madrasah berjalan dengan baik secara terus menerus tentu akan berdampak positif bagi warga madrasah dan juga meningkatnya mutu pendidikan di madrasah.

Namun pada kenyataannya banyak madrasah yang mengalami kendala dalam melaksanakan manajemen madrasah. Hal tersebut menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan mutu. Seperti yang diungkapkan Sallis yang dikutip oleh Husaini Usman, ia mengemukakan bahwa:

“Sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga madrasah hanyalah pelaksanaan belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya. Pendapat Sallis ini mendukung pendapat Juran, salah seorang begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu, 85% oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya.”

Kendatipun MBM telah diterapkan di madrasah, namun kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah. Adapun hambatannya yakni keterbatasan waktu *stakeholders* meliputi warga madrasah, komite dan masyarakat dalam mensosialisasikan program-program madrasah. Kemudian partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat (komite madrasah) belum sepenuhnya berperan aktif untuk ikut dalam melaksanakan program madrasah.

Kendala lainnya yakni lemahnya pemahaman warga madrasah (guru dan karyawan) dalam menerapkan prinsip-prinsip MBM yang menekankan pada aspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan, transparansi dan akuntabilitas madrasah, kemudian kurang konsistensinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tupoksi, yang akan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan program madrasah.

Di sisi lain terdapat dampak positif dari pengaruh MBM yang sudah dilaksanakan oleh madrasah yaitu banyaknya prestasi yang diraih madrasah baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Selain itu, banyak juga lulusan (*output*) yang diterima dan mampu bersaing di perguruan tinggi. Karena mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan SDM yang sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional, justru dikatakan masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada masa kini (Ihsan, 2004, p.15).

Dengan adanya Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam

mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi warga madrasah dan masyarakat (komite madrasah), adanya hubungan kemitraan yang kuat antar *stakeholders* dan juga terciptanya madrasah yang transparan dan akntabel dalam penyelenggaraan program madrasah.

Oleh karena itu, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan masalah yang muncul, dengan judul penelitian tentang **”Pengaruh Manajemen Berbasis Madrasah Terhadap Mutu Pendidikan (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala madrasah dalam menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah terhadap perbaikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Pengaruh antara Manajemen Berbasis Madrasah terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi kearah mana atau data (informasi) apa yang akan dicapai melalui penelitian ini. Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut.
2. Untuk Menggambarkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut.

3. Untuk Menganalisis Pengaruh antara MBM terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat diambil dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya peran kepala madrasah dalam Menerapkan MBM
 - b. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ilmu pendidikan khususnya manajemen madrasah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak madrasah dalam menerapkan MBM.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan menentukan kebijakan dalam menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah.

E. Batasan Penelitian

Permasalahan yang telah diuraikan diatas terdapat Batasan-batasan yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Adapun pembatasan penelitian ini adalah:

1. Manajemen berbasis madrasah yang dibahas adalah efektivitas dan efisiensi Pendidikan, dan tata pengelolaan madrasah.
2. Mutu Pendidikan yang dibahas mengerucut kedalam 2 (dua) standar Pendidikan yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Pengelolaan.

F. Kerangka Berpikir

Belakangan ini dunia pendidikan di Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang nampak dilakukan adalah dengan menggalakkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah terlebih dahulu akan dibahas mengenai mutu dan mutu pendidikan. Mutu merupakan derajat atau tingkat keunggulan suatu produk baik berupa hasil kerja maupun upaya dimana dalam suatu standar memerlukan biaya yang rendah. Permasalahan dalam bidang pendidikan yang dianggap penting adalah mutu pendidikan yang masih sangat rendah. Mutu pendidikan merupakan mutu lulusan dan setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kompetensi yang dicapai atau dimiliki oleh siswa.

Konsep mengenai pengelolaan pendidikan yang selama ini dilaksanakan lebih bersifat sentralistik sehingga segala kebijakan dibuat oleh birokrasi pusat sedangkan madrasah hanya bertindak sebagai pelaksana atas kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai kebutuhan belajar siswa, lingkungan madrasah serta harapan orang tua dan masyarakat sekitar. Fenomena ini sangat kontradiktif sehingga diperlukan adanya perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu maka konsep manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan pendekatan baru dalam manajemen pendidikan di Indonesia yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang telah dikembangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2001, hlm. 3) mendefinisikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah sebagai berikut:

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan, orang tua siswa

dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Definisi MBM yang dikemukakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan pemahaman bahwa inti dari MBM adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan secara langsung semua warga madrasah. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2001, hlm. 4) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah dianggap perlu diterapkan di Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

- a. Madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan madrasahnyanya;
- b. Madrasah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
- c. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh madrasah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan madrasah karena pihak madrasahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi madrasahnyanya;
- d. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
- e. Keterlibatan semua warga madrasah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan madrasah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Madrasah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;

- f. Madrasah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan madrasahmadrasahlain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upayaupaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat;
- g. Madrasah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Selanjutnya, di dalam buku Manajemen Mutu Berbasis Madrasah karangan Suryadi, terdapat pengertian Mutu menurut ISO. Pengertian mutu menurut ISO adalah “gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat”.

Menurut Nanang Fattah di dalam buku Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, ia menjelaskan bahwa:

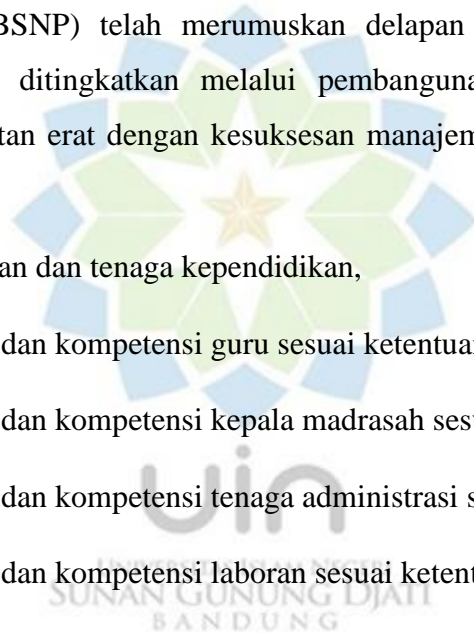
Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (satisfaction) pelanggan (customers) yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan eksternal customer. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (leaners) dan eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri.

Lebih jauh, menurut Amiruddin Siahaan, dkk, mengemukakan bahwa: “Mutu itu dapat dilihat bagaimana madrasah melalui guru-gurunya dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan secara baku dalam konteks lokal maupun nasional”. saat ini mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan (Kadarisman, 2019, hlm: 474).

Hal serupa terkait mutu pendidikan juga dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani, dkk, di dalam buku Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah, ia mengemukakan bahwa:

“Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan pengelola pendidikan. Kerangka filosofi pendidikan dalam pengembangan madrasah bermutu adalah kesesuaian input, proses, dan hasil madrasah para pemangku kepentingan”.

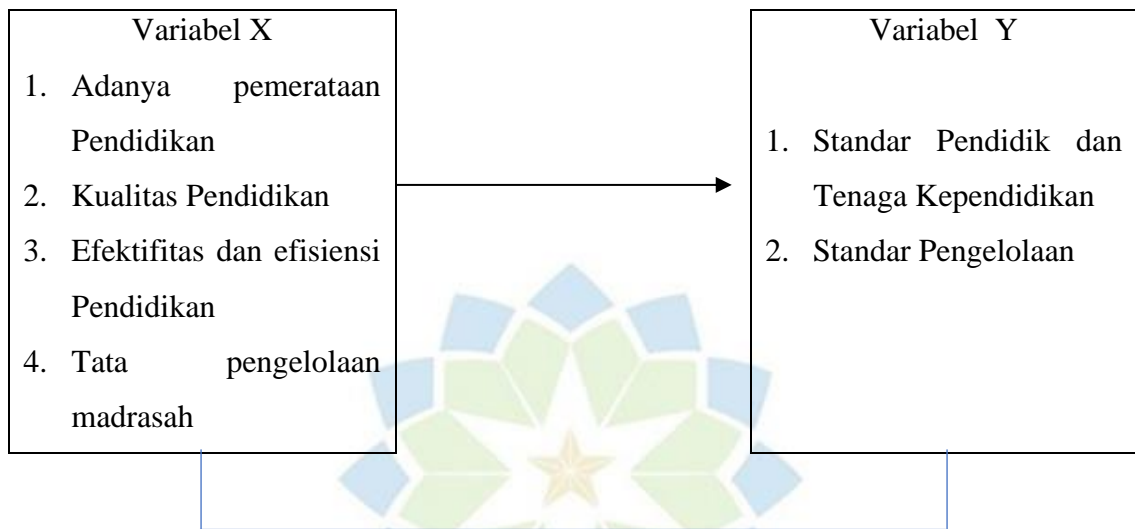
Standar mutu pendidikan tentu berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah menetapkan kriteria minimal untuk mengukur mutu pendidikan. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah merumuskan delapan aspek atau komponen pendidikan yang harus ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan ini tiga diantaranya yang berkaitan erat dengan kesuksesan manajemen berbasis madrasah , adalah:

- 
- i. Standar Pendidikan dan tenaga kependidikan,
 - a. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
 - b. Ketersediaan dan kompetensi kepala madrasah sesuai ketentuan,
 - c. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan,
 - d. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan
 - e. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan
 - ii. Standar pengelolaan,
 - a. Madrasah melakukan perencanaan pengelolaan
 - b. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
 - c. Kepala madrasah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
 - d. Madrasah mengelola sistem informasi manajemen

Pemahaman yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa manajemen berbasis madrasah sangat berperan dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Penerapan manajemen berbasis madrasah memerlukan kesiapan berbagai komponen dan perangkat pendidikan baik secara internal maupun eksternal yang dapat mendukung pelaksanaan penerapan manajemen berbasis madrasah itu sendiri (Safitri, 2020, hlm:4). Dengan begitu manajemen berbasis madrasah harus benar-benar dilaksanakan agar mutu atau kualitas pendidikan mengalami peningkatan. Berkaitan dengan itu faktor kesuksesan manajemen berbasis madrasah tersebut, adalah:

1. Adanya pemerataan Pendidikan,
 - a. Tidak adanya dikotomi atau perbedaan antara madrasah negeri dan swasta
 - b. Terjaminnya kualitas Pendidikan yang baik
2. Kualitas Pendidikan,
 - a. Pengayaan kurikulum dan bahan ajar
 - b. Pembinaan ketenaga kerjaan dan pertumbuhan jabatan profesi
 - c. Program kesiswaan
 - d. Hubungan madrasah dengan masyarakat
3. Efektifitas dan efisiensi Pendidikan,
 - a. Proses manajemen madrasah dalam sistem otonomi madrasah
 - b. Proses belajar mengajar dalam sistem otonomi madrasah
4. Tata pengelolaan madrasah,
 - a. Keadilan
 - b. Partisipasi
 - c. Akuntabilitas
 - d. Transparansi

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian ini, yaitu tentang : “Pengaruh Manajemen Berbasis Madrasah Terhadap Mutu Pendidikan Madrasah”



Pengaruh Manajemen Berbasis Madrasah Terhadap Mutu Pendidikan

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lurus diuji secara empiris. Banyak hal yang mempengaruhi Mutu Pendidikan Madrasah diantaranya menggunakan Manajemen Berbasis Madrasah. Maka semakin baik peningkatan mutu Pendidikan Madrasah. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis nol (H_0)

H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara Manajemen Berbasis Madrasah terhadap Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut

2. Hipotesis kerja atau hipotesis alternative (H_a)

H_a : Ada pengaruh signifikan antara Manajemen Berbasis Madrasah terhadap Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut

Berdasarkan asumsi diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Semakin positif tanggapan pendidik dan tenaga kependidikan mengenai manajemen berbasis madrasah yang diterapkan, semakin tinggi mutu pendidikan, sebaliknya semakin negatif tanggapan pendidik dan tenaga kependidikan mengenai manajemen berbasis madrasah yang diterapkan, semakin rendah mutu pendidikan di Madrasah Aliyah.

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 % maka untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan rumus: jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak, berarti ada dampak variabel X terhadap variabel Y, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima, berarti tidak ada dampak variabel X terhadap variabel Y.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian peneliti terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa uraian literature yang akan peneliti gunakan sebagai referensi penelitian yaitu:

Pertama, Ayes Rintiani (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah Menengah Atas Kejuruan (SMK) Swasta Kelompok Bisnis dan Manajemen Se-Kabupaten Banyumas” yang menyatakan bahwa pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu lulusan SMK swasta kelompok Bisnis dan Manajemen se-Kabupaten Banyumas sebesar 0,820 atau 82% dan sisanya 18% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dikaji dalam penelitiannya. Berdasarkan hipotesis maka penelitian tersebut diterima. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah yang diteliti mengenai mutu lulusan yang ada pada standar kompetensi lulusan berbeda dengan peneliti yang memfokuskan pada standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, Rizqo Adhani Simanjuntak (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mis Nurul Anwar Tanjungbalai” yang menyatakan bahwa Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MIS Nurul Anwar Tanjungbalai, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Melihat adanya implementasi MBS di MIS Nurul Anwar Tanjungbalai ini berbeda dengan Madrasah-madrasah yang ada pada umumnya. MIS Nurul Anwar Tanjungbalai, memiliki Kurikulum Yayasan dan bersifat mandiri, selain itu madrasah ini memiliki Manajemen Humas yang sangat baik dengan masyarakat setempat, peran serta masyarakat sangat tinggi, antara pihak madrasah dengan masyarakat sudah sangat akrab bagaikan keluarga yang saling membantu sama lain, masyarakat setempat bahkan rela membantu bergotong royong untuk membangun gedung madrasah tanpa gaji sedikitpun. Lalu, hal yang membedakan penelitian ini adalah berkenaan sample yang diteliti berbeda dengan madrasah ibtidaiyah juga pokok penelitian lebih kepada pengelolaan Pendidikan dan PTK.

Ketiga, Titi Khotimah (2011), dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri 2 Wonosari” hasil penelitian ini menyatakan dari hasil analisis data, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan kinerja guru di SMK Negeri 2 Wonosari memiliki kecenderungan sangat baik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terhadap kinerja guru di SMK Negeri 2 Wonosari, dengan kontribusi MBS terhadap kinerja guru adalah sebesar 24,8% sehingga masih ada 75,2% faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru. Hal yang menjadi perbedaan dengan yang peneliti teliti adalah mengenai Manajemen Berbasis Madrasah yang akan diimplementasikan di Madrasah berbeda dengan Manajemen Berbasis Sekolah yang akan diimplementasikan di SMK.